

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa Orde Baru, Sejarah Nasional Indonesia (SNI) menjadi narasi sejarah resmi (*official history*) yang mencerminkan konsep-konsep besar pemerintah. Interpretasi kekuasaan dalam SNI sangat tampak dengan menempatkan Orde Baru sebagai penyelamat Republik Indonesia di kala krisis pascaperistiwa 1965. Penulisan SNI didesain sebagai promosi dari pemerintah Orde Baru yang erat dengan legitimasi negara dan identitas nasional yakni nasionalisme dan militerisme (Sjamsuddin & Mulyana, 2022). Selain itu, SNI juga bersifat eksklusif, bernuansa propaganda, dan menganut tafsir tunggal terhadap beberapa peristiwa sejarah yang dianggap penting bagi eksistensi Orde Baru (Mulyana, 2013). Kecenderungan narasi dalam SNI juga bersifat politis dan Jawasentris sehingga meminggirkan tema-tema lainnya (Mulyana, 2017). Karya SNI belum sepenuhnya mengakomodasi pandangan maupun peran sejarah berbagai kelompok masyarakat yang beragam dalam kategori gender, kedaerahan, suku, maupun agama yang turut membentuk nasionalisme bangsa. Sejarah nasional yang selama ini dipahami masyarakat masih menyimpan persoalan dalam mengungkap lebih jauh aktivitas berbagai kelompok masyarakat. Salah satunya tentang keberadaan dan peran masyarakat Tionghoa yang telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Peminggiran Tionghoa pada periode sejarah tertentu terjadi selama tiga dekade Orde Baru berkuasa. Sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, narasi tentang Tionghoa masih kerap dijumpai dalam karya-karya sejarah maupun buku teks sejarah. Misalnya tentang peristiwa Geger Pacinan hingga perlawanan masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat yang tergolong sebagai sejarah lokal (Pane, 1950; Sanusi, 1955; Sundhoro, 1969; Suparno, 1960). Pada masa Orde Baru, peristiwa-peristiwa itu tidak lagi dibicarakan. Bahkan dalam SNI Jilid VI cetakan tahun 1993, tokoh-tokoh Tionghoa anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) menghilang dan Tionghoa lebih banyak digambarkan dalam konteks *economic animal* (Kwartanada, 2020). Situasi ini semakin kuat dengan dijadikannya SNI sebagai buku “babon” yang menjadi acuan

standar penulisan buku teks sejarah untuk sekolah lanjutan (Darmawan, 2023). Narasi-narasi sejarah yang berhubungan dengan Tionghoa tidak pernah didengar oleh generasi muda. Stereotipe dan prasangka terhadap Tionghoa sebagaimana dikonstruksi pemerintah Orde Baru terus dipupuk oleh bayang-bayang asimilasi.

Situasi berubah sejak Orde Baru berakhir dan muncul gerakan Reformasi. Penulisan sejarah juga semakin berkembang dengan mengusung beragam perspektif dan tema. Historiografi yang menampilkan eksistensi dan peran Tionghoa dalam lingkup sejarah lokal maupun nasional di Indonesia bermunculan seiring dengan sikap yang lebih terbuka dalam menerima keberadaan Tionghoa. Apabila kajian Tionghoa pada masa Orde Baru sangat terbatas, sejak Reformasi, menjamurlah buku-buku, artikel-artikel ilmiah, publikasi populer, maupun berbagai kajian ilmiah lainnya mengenai sejarah Tionghoa dari berbagai sudut pandang, tema, dan lokalitas di Indonesia yang ditulis oleh para sejarawan, peminat, hingga pelaku sejarah. Biografi mengenai tokoh-tokoh Tionghoa juga banyak diterbitkan.

Perubahan positif ini tidak lepas dari perkembangan dinamika politik dimulai dari Presiden B. J. Habibie yang mengeluarkan aturan mengenai penghapusan istilah “pribumi” dan “nonpribumi”. Selanjutnya Presiden K. H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Inpres ini dikeluarkan oleh Presiden Soeharto yang melarang tradisi dan berbagai hal berbau Tionghoa dilakukan secara mencolok dengan alasan agar tidak menghambat proses asimilasi. Penerimaan terhadap peran Tionghoa juga tampak dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada mendiang Laksamana Muda TNI John Lie Tjeng Tjoan alias Jahja Daniel Dharma. Gelar ini diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 November 2009. Peran serta Tionghoa dalam bidang-bidang lain termasuk memegang jabatan politik juga semakin terbuka.

Pesatnya perkembangan historiografi Tionghoa dan berbagai perubahan positif pada era Reformasi menunjukkan semakin diterimanya Tionghoa, namun dalam ranah pendidikan sejarah terbelah lamban menanggapinya. Respon terkait Tionghoa pertama kali muncul dengan masuknya nama Kwee Tek Hoay dan topik

sastra melayu Tionghoa dalam buku teks sejarah untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI pada Jurusan Bahasa pada Kurikulum 2006 (Kwartanada, 2020). Itu pun hadir dalam buku teks pendamping yang diterbitkan pihak swasta. Respon yang cukup kentara dan merepresentasikan pandangan negara baru muncul dalam buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA menurut Kurikulum 2013 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) pada tahun 2017 dan 2018.

Selain persoalan itu, buku teks sejarah juga kurang tanggap zaman dan isinya cenderung tidak berubah (Darmawan & Mulyana, 2016; Hasan, 2000). Selain pengaruh Orde Baru yang lebih dari tiga dekade sulit dihilangkan begitu saja, penulisan buku teks banyak didasarkan pada buku teks sebelumnya kendati kurikulum telah berubah (Darmawan, 2019). Asalkan mencantumkan pernyataan “sesuai dengan kurikulum yang berlaku”, maka buku teks tetap diyakini validitasnya dan digunakan begitu saja. Kedalaman maupun ruang lingkup pokok bahasannya sering dirasa tidak perlu diperbincangkan lagi (Hasan, 2000). Bercermin dari pengalaman itu, maka representasi Tionghoa yang diupayakan dalam buku teks Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013 perlu analisis lebih lanjut.

Materi tentang peran Tionghoa terutama muncul pada kelas XI semester 1. Secara khusus, peristiwa pembantaian terhadap Tionghoa di Batavia hingga persekutuan Tionghoa-Jawa melawan kongsi dagang Belanda (1740-1743) kembali tampil dan dibahas sepanjang dua halaman (Sardiman & Lestariningsih, 2017, hlm. 92–93). Episode sejarah yang juga biasa hadir dalam buku-buku teks sejarah pada masa sebelum SNI terbit ini diberi judul “Orang-orang Cina Berontak”. Selain peristiwa itu, Tionghoa juga beberapa kali disebut dan dibicarakan pada topik-topik lain di jilid yang lainnya. Buku teks resmi dari negara yang bersifat wajib ini juga berusaha mengakomodasi sejarah berbagai daerah maupun perspektif tertentu yang tidak pernah diperbincangkan sebelumnya.

Dari berbagai karya tentang sejarah Tionghoa Indonesia, sebenarnya muncul pemahaman umum bahwa masyarakat Tionghoa telah menjadi bagian yang turut menguatkan akar sejarah bangsa ini. Eksistensi Tionghoa di Indonesia muncul hampir di setiap periode sejarah. Anasir Tionghoa ditemukan sejak zaman prasejarah, Hindu-Buddha, maupun Islam. Tionghoa juga tercatat ambil bagian

dalam pergerakan nasional, proklamasi kemerdekaan, hingga masa pembangunan. Tentu menghadirkan kontribusi ini tidak dimaksudkan untuk menonjolkan Tionghoa secara berlebihan, namun didasarkan pada perlunya mengkaji sejarah nasional secara lebih holistik dan berimbang. Harapannya dengan memahami keberadaan Tionghoa dalam perjalanan sejarah bangsa, maka tidak mudah terjebak pada upaya penggiringan opini ke arah kebencian rasialis. Lebih lanjut lagi tumbuh kesadaran akan sejarah bangsa yang semakin utuh.

Sejatinya peran Tionghoa memang tidak bisa dikesampingkan begitu saja dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Keberadaan etnis Tionghoa telah menjadi salah satu dari sekian keberagaman yang mewarnai dinamika berbangsa. Kenyataan kebinekaan telah menjadi keniscayaan bagi bangsa Indonesia sejak dulu kala. Keberadaan masyarakat Tionghoa dapat dilihat dari data sensus penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Hasil sensus penduduk tahun 2010 mencatatkan jumlah suku Tionghoa di Indonesia sebanyak 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2010, hlm. 9). Jumlah ini menempati peringkat ke-18 kelompok terbesar dari 31 kelompok suku bangsa yang didata. Keberadaannya tersebar di seluruh provinsi dan jumlah penduduk Tionghoa masuk dalam sepuluh besar kelompok suku terbanyak di lebih dari sepuluh provinsi yang ada (Mackie, 2005, hlm. 100). Terbanyak ada di DKI Jakarta yakni 632.372 jiwa dan paling sedikit di Sulawesi Barat sejumlah 660 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010, hlm. 9, 41). Persebaran penduduk Tionghoa di berbagai daerah memberi pemahaman baru bahwa etnis ini tidak selalu menjadi minoritas secara keseluruhan di berbagai daerah di Indonesia.

Sensus penduduk tahun 2010 ini menjadi data resmi yang dikeluarkan pemerintah yang menggambarkan jumlah dan persebaran orang Tionghoa di Indonesia. Sensus terbaru tahun 2020 tidak menampilkan data penduduk menurut kelompok suku bangsa. Kendati demikian jika mencermati tren pertumbuhan penduduk secara umum maka ada kemungkinan besar jumlah penduduk Tionghoa kini juga bertambah. Di sisi lain, data hitam di atas putih ini dimungkinkan berbeda dengan kenyataan di lapangan. Artinya jumlah orang Tionghoa dan persebarannya di Indonesia boleh jadi melebihi angka-angka tersebut. Kenisbian informasi ini

tidak lepas dari pengalaman sejarah masyarakat Tionghoa, khususnya pada masa Orde Baru, yang memengaruhi sikap mereka dalam mengakui jati dirinya.

Mayoritas Tionghoa sekarang ini adalah kelompok peranakan yang merupakan hasil kawin campur antara Tionghoa dengan penduduk setempat yang telah mendorong terjadinya akulturasi budaya. Menurut Suryadinata (1986, hlm. 20), kaum peranakan telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat dan merasa sebagai bagian dari penduduk lokal. Apalagi dengan masifnya program asimilasi pada masa Orde Baru, kecenderungan ini semakin meningkat. Tionghoa harus melebur menjadi “pribumi” atau salah satu suku yang dianggap “pribumi”, kalau itu terjadi barulah mereka dianggap “komplet” memenuhi syarat untuk menjadi bangsa Indonesia. Asimilasi mendesak pembauran Tionghoa ke dalam budaya lokal di tempat mereka masing-masing tinggal sebagai wadah resmi (Hoon, 2006). Untuk itu hasil dari asimilasi yang paling diharapkan yakni tidak ada lagi yang mendefinisikan diri sebagai orang Tionghoa.

Pengalaman sejarah selama lebih dari tiga dekade Orde Baru berkuasa telah mengubah eksistensi dan pandangan terhadap Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam. Asimilasi membuat bineka (keberagaman) pernah dikorbankan atas nama ika (persatuan) melalui represi terhadap etnisitas (Hoon, 2006, hlm. 153). Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menggunakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat untuk menguatkan kebijakan asimilasi sebagaimana diungkap oleh Freedman (2003, hlm. 440)

*The Suharto government (and they were not alone in this) manipulated the idea of a national cultural community, which was then used to legitimate Suharto's political order. This goal was enshrined in the idea of Pancasila. Literally translated as the five principles, Pancasila became the official Indonesian state ideology under Suharto, and it continues to be a defining aspect of the state. Pancasila designates Bahasa Indonesia as the national language, and it requires citizens to pledge support for a national identity as Indonesians. The national slogan, Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, was used to promote assimilation and support for Suharto's New Order regime.*

Asimilasi yang terjadi secara wajar dan sukarela sebenarnya hal yang positif. Akan tetapi dalam kenyataannya, Orde Baru melakukan asimilasi secara paksa, masif, dan terstruktur. Perlakuan diskriminasi tidak jarang terjadi. Berbagai hal yang berkaitan dengan Tionghoa sering dicitrakan dengan hal-hal yang bernuansa

Hendra Kurniawan, 2023

**REPRESENTASI TIONGHOA SEBAGAI KONSTRUKSI KEBINEKAAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peyoratif, ketidaksukaan (anti), dan memojokkan posisi orang-orang Tionghoa. Bahkan ketionghoan secara luas dipersepsikan sebagai masalah domestik dengan label “Masalah Cina” yang bisa merugikan solidaritas dan mengancam integrasi bangsa sehingga harus diselesaikan dengan program asimilasi (Chua, 2004, hlm. 466; Hoon, 2006, hlm. 152; Purdey, 2003, hlm. 425). Ketionghoan pada masa ini berada di bawah ancaman penghapusan. Orde Baru melalui Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) sampai membentuk sebuah institusi yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina.

Upaya asimilasi dan pembauran ternyata tidak lantas meniadakan sentimen anti-Cina. Kerusakan sosial yang menysar Tionghoa masih kerap terjadi pada masa Orde Baru. Puncaknya pada Mei 1998 yang semakin memupuk rasa takut untuk mengekspos identitas ketionghoan. Hal ini tampak dari hasil sensus penduduk tahun 2000 – untuk pertama kalinya kembali mengidentifikasi penduduk beretnis Tionghoa setelah terakhir kali dilakukan pada tahun 1930 – tercatat penurunan persentase penduduk Tionghoa dari 2% menjadi kurang dari 1% total populasi (Mackie, 2005, hlm. 98). Kendati demikian, Mei 1998 memiliki efek ganda, di satu sisi menciptakan ketakutan namun juga membangkitkan kesadaran bersama untuk menerima keberadaan Tionghoa di Indonesia, termasuk membuka pandangan luas bahwa asimilasi Orde Baru telah gagal (Hoon, 2006, hlm. 153).

Anti-Cina dan perlakuan diskriminatif muncul sejak era kolonial dan tidak hilang setelah kemerdekaan dicapai (Pangestu et al., 2021). Bahkan dikekalkan pada masa Orde Baru hingga ke daerah-daerah (Sodiq & Santoso, 2022). Strateginya dengan meminggirkan Tionghoa sebagai *economic animal* yang mendorong sikap asosial dan apolitis. Dalam fungsinya sebagai pedagang perantara (*economic middleman*) maupun pemilik modal, Tionghoa menjelma sebagai minoritas yang mendominasi perekonomian (Freedman, 2003; Sunny Lie & Bailey, 2016). Mereka berperan penting dalam perekonomian nasional maupun daerah dan sebagian kecilnya tumbuh sebagai konglomerat (Arifin et al., 2016). Mereka yang sebagian kecil ini memiliki kedekatan dan mendapat keistimewaan dari penguasa Orde Baru. Bagi Tionghoa yang sukses dalam posisi tersebut memiliki kondisi ekonomi yang baik sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tengah

masyarakat. Akibatnya Tionghoa menjadi sasaran konflik sosial yang beberapa kali meletus di berbagai daerah dan menjadi bahaya laten.

Tionghoa dominan difungsikan secara ekonomi namun diabaikan dalam bidang lain. Rademakers (1998, hlm. 1012) menuliskan situasi ini dengan kalimat “*Indonesia's politics are dominated by the Javanese, while business in Indonesia is dominated by an ethnic minority: Indonesians of Chinese origin*”. Padahal sejatinya peran Tionghoa dapat dijumpai dalam banyak bidang. Tionghoa ikut berjuang melawan penjajahan Belanda, berperan dalam perkembangan sastra Melayu, memajukan pers, perfilman, olahraga, seni, kuliner, dan banyak lainnya (Setiono, 2008; Suryadinata, 2002). Bahkan termasuk juga dalam bidang perpolitikan bangsa. Peran-peran ini pada masa Orde Baru tentu saja tidak pernah disinggung secara terbuka, apalagi disampaikan dalam pembelajaran sejarah di sekolah.

Secara umum, materi sejarah dalam buku teks pada masa Orde Baru memang dipolitisir sedemikian rupa sebagai alat untuk melegitimasi rezim yang sedang berkuasa. Interpretasi terhadap fakta sejarah sarat dengan kepentingan politik yang harus diterima sebagai kebenaran, guru hanya berperan sebagai penyampai materi sejarah resmi menurut versi penguasa. Buku teks sejarah menjadi lebih berpihak pada otoritas atau hegemoni kekuasaan ketimbang kepentingan siswa (N. Supriatna, 2007). Pembelajaran sejarah yang juga mengemban tugas dalam pengembangan aspek sikap menjadi kurang bermakna karena tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer (N. Supriatna, 2007, 2008) seperti perilaku intoleransi, sentimen etnis dan agama, anti keberagaman, hingga masalah kemiskinan, konsumerisme, lingkungan, dan lainnya. Maka pengembangan materi pembelajaran sejarah sangat penting dilakukan dengan memperhatikan tantangan zaman.

Teori kritis (*critical theory*) penting dijadikan landasan untuk melihat bagaimana Tionghoa yang teralienasi dari sejarah nasional selama Orde Baru kini diakomodasi kembali dalam pembelajaran sejarah. Dalam pandangan kritis, kesadaran mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi wacana utama yang dibangun dalam representasi Tionghoa. Pembelajaran sejarah dalam konteks pendidikan kebinekaan harus memperhatikan keberagaman latar belakang dan budaya siswa. Sesuai dengan tugasnya, pendidikan sejarah harus mengembangkan dan memperkuat jati diri bangsa berdasarkan keberagaman budaya yang ada.

Pendidikan sejarah harus mampu membangun penghargaan terhadap perbedaan dan memperkuat persamaan di antara keberagaman tersebut.

Buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA menurut Kurikulum 2013 yang diterbitkan Kemendikbud RI merepresentasikan sikap negara dan misi pemerintah tampak dalam interpretasi narasi-narasi yang dibangun di dalamnya (Mulyana, 2013, hlm. 80). Buku teks ini memang telah berupaya menanggapi perkembangan sosial politik yang terjadi pasca-Reformasi terutama terkait dengan eksistensi Tionghoa dalam sejarah. Di sisi lain, sebagai karya pendidikan sejarah maka buku teks tidak lepas dari internalisasi nilai (*values*). Dalam konteks menghadirkan kembali peran Tionghoa dalam sejarah, maka upaya pengenalan dan penghargaan terhadap keanekaragaman serta penghilangan stereotipe dan prasangka menjadi nilai yang utama. Artinya materi tersebut diharapkan mampu mengonstruksi wawasan kebinekaan siswa. Apalagi kenyataan di tengah masyarakat, konstruksi wacana tentang Tionghoa yang diwariskan Orde Baru masih begitu lekat dan sentimen anti-Cina kerap juga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (Kristiono, 2018; Kuntjara & Hoon, 2020). Untuk itu, isi buku teks perlu dibongkar secara kritis agar dapat diperoleh gambaran esensial mengenai wacana kebinekaan yang dikonstruksi melalui representasi Tionghoa.

Penelitian tidak berhenti pada praktik wacana dalam produksi teks, namun penggunaannya dalam pembelajaran di kelas juga perlu diteliti untuk mengetahui interpretasi dan reproduksi wacana dari pengguna buku teks yakni siswa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran tidak lepas dari buku teks yang digunakan oleh guru sebagai sumber belajar. Buku teks terbukti sangat mendominasi dalam pembelajaran (Saripudin & Komalasari, 2016; Sutrimah et al., 2019). Penggunaan buku teks bermaksud untuk memberi pedoman bagi siswa agar tidak kehilangan orientasi dalam belajarnya di kelas (O'Neill, 1982). Buku teks memberi kontribusi besar bagi perkembangan kognitif tingkat rendah hingga menengah, namun untuk mencapai kognitif tingkat tinggi penggunaan buku teks harus didukung proses interaksi dengan sumber belajar lain, guru, maupun aktivitas kolaborasi antarsiswa (Hung Lau, Kwok et al., 2017; E. Supriatna, 2013).

Posisi buku teks sangat penting, tetapi apabila dimanfaatkan begitu saja berpotensi menghambat berkembangnya keterampilan berpikir kritis siswa

(Errington & Bubna-Litic, 2015; E. Supriatna, 2013). Buku teks di Amerika Serikat dan India digunakan sejak kelas awal, sementara di negara-negara Eropa, buku teks lebih banyak dijumpai di pendidikan tingkat lanjut. Di Indonesia, buku teks digunakan sejak tingkat dasar, menengah, bahkan tinggi. Apalagi bagi sekolah-sekolah di pedalaman yang akses sumber belajarnya minim, keberadaan buku teks sangat diandalkan (Pusat Perbukuan, 2019). Dengan demikian, pemanfaatan dan pemaknaan isi buku teks dalam proses belajar siswa bergantung pada pembelajaran yang direncanakan dan disajikan oleh guru.

Penggunaan buku teks harus diikuti kecakapan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apabila guru sekedar menyampaikan begitu saja isi buku teks maka yang terjadi hanyalah transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). Seyogianya tugas pendidikan juga mendorong internalisasi nilai (*transfer of value*). N. Supriatna (2007) mengungkap temuan buku teks hanya digunakan sebagai bahan persiapan guru mengajar dan alat bantu siswa dalam mengerjakan tugas maupun keperluan asesmen belajar. Bahkan dalam beberapa kasus, buku teks membelenggu guru dan siswa karena materi yang diajarkan hanya terpaku dan sama persis dengan yang tertulis dalam buku teks. Guru tidak mengeksplorasi sumber belajar lain maupun mendorong daya kritis siswa (Darmawan & Mulyana, 2016, hlm. 5).

Di sisi lain, sebagaimana telah ditekankan, buku teks merupakan karya pendidikan sejarah yang bukan tanpa nilai. Buku teks sejarah mengemban tujuan pedagogis yakni internalisasi karakter kebangsaan bagi siswa sebagai generasi muda. Pembelajaran sejarah yang bermakna diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian nilai yang efektif. Di berbagai negara, nilai patriotisme dan nasionalisme selalu menjadi yang utama diperjuangkan oleh mata pelajaran Sejarah. Pencapaian tujuan ini seringkali abai dengan kenyataan multikultural suatu bangsa yang juga penting dalam membentuk kesadaran nasionalisme yang sejati. Representasi minoritas dalam sejarah suatu negara justru kerap dipandang dapat memberi pengaruh terhadap konstruksi identitas nasional (Al-Haj, 2005; Çayir, 2009; Liu, 2015; Yan & Vickers, 2019). Akibatnya pembelajaran sejarah berpotensi mengalami misinterpretasi dalam menyajikan narasi yang beragam.

Dalam konteks Indonesia, penelitian Djono & Joebagio (2019) memaparkan bahwa buku teks sejarah cenderung menempatkan narasi dan wacana persatuan

lebih menonjol ketimbang kesadaran akan kebinekaan. Selain itu, guru juga dijumpai lebih mengartikulasikan pentingnya persatuan dan integrasi dibanding kesadaran akan keberagaman. Dari penelitian Djono & Joebagio (2019) didapati bahwa pandangan guru terhadap wacana kebinekaan dalam penggunaan buku teks sejarah terbilang kurang. Lebih lanjut dikatakan bahwa posisi tidak setara antara persatuan dengan keberagaman dalam narasi dan wacana buku teks dapat menjadi masalah laten bagi integrasi seperti intoleransi minoritas dan pemusnahan.

Dengan demikian muncul indikasi bahwa pembelajaran sejarah – dalam konteks ini adalah penggunaan buku teks yang merepresentasikan Tionghoa – perlu dikaji dan dikritisi. Pemanfaatan apa adanya buku teks sejarah yang hanya memuat fakta berpotensi membenamkan siswa ke dalam lautan fakta. Siswa menjadi merasa jenuh dan kering dengan pembelajaran sejarah (Darmawan & Mulyana, 2016, hlm. 5). Di sisi lain, sebagaimana diungkap N. Supriatna (2007, hlm. 61), guru seringkali hanya berperan sebagai mesin pengajar yang mengejar target kurikulum. Guru enggan mengkaji lebih jauh suatu peristiwa sejarah yang dianggap tabu oleh rezim yang berkuasa maupun mencoba menginterpretasi secara kritis suatu narasi sejarah dalam buku teks. Maka dalam konteks hadirnya kembali representasi Tionghoa dalam buku teks sejarah dibutuhkan pula aktivitas pembelajaran yang kritis dan kreatif. Tujuannya yakni memberi kesempatan pada siswa untuk mengonstruksi wacana kebinekaan melalui materi yang disampaikan.

Proses pembelajaran sejarah yang merepresentasikan Tionghoa dengan memanfaatkan buku teks maupun sumber belajar lain untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna merupakan fenomena yang penting dan perlu dikaji. Pembelajaran tidak hanya kritis dan kreatif, namun juga perlu menggunakan strategi yang kontekstual dengan siswa melalui *making connection* (N. Supriatna & Maulidah, 2020). Sekolah dengan mayoritas siswa Tionghoa dapat memanfaatkan kekayaan sejarah lokal setempat yang berhubungan dengan Tionghoa. Kisah-kisah sejarah keluarga dari siswa Tionghoa juga dapat memperkaya pemahaman siswa lainnya terhadap peran Tionghoa. Selain itu, kedekatan emosional siswa dengan peristiwa sejarah yang dipelajari dapat menjadi sumber belajar berharga yang dapat mengembangkan pengetahuan siswa (Evans, 2020; Sutimin & Akhyar, 2018).

Strategi yang tepat sangat penting dalam implementasi pembelajaran yang dilakukan guru dalam merepresentasikan Tionghoa karena akan membentuk pengalaman belajar yang dimaknai oleh siswa. Di sisi lain, tujuan pedagogis dari buku teks pelajaran sejarah yakni internalisasi karakter kebangsaan, termasuk kenyataan hidup berbangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, harus dikonstruksi dalam aktivitas belajar siswa. Untuk itu, pengalaman belajar akan menentukan tanggapan konstruktif atau destruktif siswa terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang menunjukkan peran Tionghoa. Pemaknaan dari pengalaman belajar siswa akan menentukan konstruksi wacana kebinekaan dalam dirinya.

Kebinekaan dengan kontribusi beragam golongan masyarakat telah membangun kebangsaan Indonesia. Artinya keberagaman di Indonesia secara jelas membentuk corak nasionalisme sebagaimana dirumuskan dalam Bhinneka Tunggal Ika (Tilaar, 2014). Berkembangnya wacana kebinekaan diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa. Tionghoa harus dipahami sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam dan sama dengan kelompok masyarakat lainnya meskipun memiliki dinamika yang berbeda. Sejarah juga mencatat sejatinya masyarakat Nusantara sejak dulu hidup berdampingan dan harmonis sebelum termakan politik pecah belah yang dilakukan pemerintah kolonial.

Pendidikan sejarah tidak boleh mengabaikan keberagaman budaya dengan mencoba membangun suatu budaya monolit (Hasan, 2012). Pendidikan sejarah sebagai sarana pendidikan karakter kebangsaan harus berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai konsensus nasional, Pancasila memuat kemanusiaan universal, nasionalisme, dan keutamaan nilai-nilai lokal yang menjadi khazanah nasional. Termasuk pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman yang membentuk bangsa ini. Dengan tumbuhnya kesadaran kebinekaan maka benturan nilai yang muncul dalam berbagai bentuk khususnya fundamentalisme dapat dihindari.

Apabila sejarah diajarkan secara keliru akan membuat manusia menjadi penganut aliran yang berlebih-lebihan dan bersikap fanatik (Aman, 2011, hlm. 100). Maka sejarah harus diajarkan dengan baik agar menghasilkan manusia yang kritis dan humanis. Pembelajaran sejarah perlu senantiasa relevan dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran sejarah perlu melakukan reorientasi dalam

pemilihan bahan ajar dan interpretasinya beserta perspektif pembelajarannya agar berwawasan masa depan (Aman, 2011, hlm. 101). Pilihan materi yang disajikan dalam buku teks Sejarah Indonesia tentu bermaksud mengenalkan nilai-nilai bangsa yang diperjuangkan di masa lalu, dipertahankan dan disesuaikan di masa sekarang, serta dikembangkan lebih lanjut untuk masa depan (Hasan, 2012).

Berdasarkan jabaran latar belakang tersebut, penelitian disertasi ini fokus pada representasi Tionghoa sebagai konstruksi kebinekaan dalam pembelajaran Sejarah Indonesia di SMA. Analisis ditinjau dari dua aspek yakni buku teks dan pengalaman belajar siswa. Penelitian diawali dengan menganalisis representasi Tionghoa dalam buku teks dan membongkar praktik wacana yang dibangun menggunakan analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA). Artinya isi buku teks dikaji dalam menuliskan tentang Tionghoa dan wacana yang dibangun dalam narasi-narasi yang dihadirkan. Buku teks yang dianalisis yakni Sejarah Indonesia kelas X, XI, dan XII SMA pada Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI. Selain menghadirkan kembali narasi Tionghoa pasca-Orde Baru secara signifikan, buku teks ini juga mencerminkan pandangan resmi negara.

Hasil analisis buku teks dilanjutkan dengan meneliti praktik pembelajarannya. Selain mempertimbangkan kesesuaian dengan penerapan Kurikulum 2013 dan penggunaan buku teksnya yang dianalisis, sekolah lokasi penelitian juga ditentukan dengan memperhatikan komposisi siswa Tionghoa. Hal ini bermaksud untuk melihat praktik baik pembelajaran di sekolah tersebut dalam mengakomodasi sejarah yang menjadi bagian kontekstual dari siswa Tionghoa. Penting pula diketahui seberapa jauh tanggapan dan kesadaran siswa Tionghoa terhadap sejarah dan peran leluhurnya bagi bangsa Indonesia. Atas pertimbangan tersebut dan dikuatkan dengan telah adanya perhatian khusus pada pembelajaran sejarah yang merepresentasikan Tionghoa, maka ditentukan sekolah lokasi untuk meneliti pengalaman belajar siswa di SMA Santa Angela Bandung.

Analisis fenomenologi yang dilakukan di SMA Santa Angela Bandung dimulai dengan praktik pembelajaran yang dilakukan guru dan ditekankan pada pengalaman belajar siswa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia yang merepresentasikan peran Tionghoa dengan memanfaatkan buku teks yang dianalisis. Hasilnya dirumuskan pengkategorian atas pemaknaan siswa terhadap

representasi Tionghoa melalui pengalaman belajarnya. Untuk memperkuat kajian, fenomena ini dianalisis dengan sudut pandang pembelajaran sejarah kritis. Artinya seperti apa siswa diberdayakan oleh guru secara kritis dan kreatif agar representasi Tionghoa dapat mengonstruksi wacana kebinekaan siswa secara kontekstual dan bermakna. Selanjutnya penting pula untuk menganalisis konstruksi kebinekaan yang dibangun melalui representasi Tionghoa yang dialami oleh para siswa.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis wacana kebinekaan atau multikulturalisme dalam buku teks sejarah di Indonesia (Tricahyono et al., 2020; Utami & Widiadi, 2016). Akan tetapi, belum didapati penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang representasi Tionghoa dalam kaitannya dengan konstruksi wacana kebinekaan. Selain itu, penelitian disertasi ini tidak hanya fokus pada buku teks, namun juga pengalaman belajar siswa dalam menggunakan buku teks tersebut. Artinya penelitian ini tidak hanya membongkar praktik wacana dalam buku teks, tetapi melihat pula interpretasi dan reproduksi wacana melalui pengalaman belajar siswa. Kajian dengan fokus dan perspektif semacam ini belum dijumpai. Pertimbangannya ialah integrasi CDA dan studi fenomenologi diyakini dapat saling melengkapi dan memperkuat penelitian sehingga hasilnya semakin valid (Hood, 2016; Martínez-Ávila & Smiraglia, 2013; Saukko, 2005).

Pada akhirnya, penelitian disertasi ini diharapkan berkontribusi bagi pembelajaran sejarah dalam merepresentasikan Tionghoa sebagai bagian dari konstruksi kebinekaan bangsa. Idealnya tumbuh kesadaran kebinekaan bahwa Tionghoa bukanlah *the other* melainkan bagian integral dari bangsa Indonesia. Selain itu, hasil penelitian disertasi ini juga sebagai bahan masukan bagi peningkatan kualitas pembelajaran maupun penyusunan buku teks yang inklusif. Apalagi Kurikulum Merdeka mengusung gagasan merdeka belajar yang membuka peluang masuknya berbagai kajian sejarah seperti muatan sejarah lokal, sosial, hak asasi manusia, feminis, dan sebagainya (Kemendikbudristek RI, 2022). Pembelajaran sejarah yang inklusif sejalan dengan semangat merdeka belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, pendidikan sejarah semakin mengukuhkan perannya melalui pengakuan dan penerimaan terhadap kebinekaan untuk menguatkan integrasi bangsa.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berangkat dari latar belakang penelitian maka rumusan masalah utama penelitian disertasi ini yakni “Bagaimana Tionghoa sebagai konstruksi kebinekaan direpresentasikan dalam pembelajaran Sejarah Indonesia?” Selanjutnya dari rumusan masalah utama dijabarkan beberapa rumusan masalah yang lebih rinci sebagai berikut

1. Bagaimana representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia yang didapati dalam buku teks dan implementasi pembelajarannya di SMA Santa Angela Bandung?
2. Bagaimana pemaknaan terhadap representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia ditinjau dari buku teks dan pengalaman belajar siswa SMA Santa Angela Bandung?
3. Bagaimana konstruksi kebinekaan yang dibangun melalui representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia ditinjau dari buku teks dan pengalaman belajar siswa SMA Santa Angela Bandung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian disertasi ini yaitu menganalisis secara kritis dan komprehensif representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia sebagai bagian dari konstruksi kebinekaan bangsa. Secara lebih rinci tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut

1. Mengeksplorasi representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia yang didapati dalam buku teks dan implementasinya di SMA Santa Angela Bandung. Eksplorasi menyangkut semua hal yang berkaitan dengan keberadaan, tokoh, peran, maupun pengungkapan lainnya mengenai Tionghoa di Indonesia yang dijumpai dalam narasi buku teks Sejarah Indonesia dan implementasi pembelajarannya.
2. Menguraikan pemaknaan terhadap representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia ditinjau dari buku teks dan pengalaman belajar siswa SMA Santa Angela Bandung. Pemaknaan terhadap representasi Tionghoa dalam buku teks diuraikan melalui praktik wacana yang dibangun. Sementara pemaknaan pengalaman belajar siswa tampak dari pengkategorian atau tema

(unit makna) yang muncul dari fenomena pembelajaran Sejarah Indonesia yang merepresentasikan Tionghoa. Keduanya memberi lensa ganda untuk mengeksplorasi informasi sehingga diperoleh pemaknaan yang komprehensif dari kajian buku teks dan pengalaman belajar menggunakan buku teks tersebut.

3. Menganalisis konstruksi kebinekaan yang dibangun melalui representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia. Aspek-aspek kebinekaan yang dijumpai dalam isi buku teks dan pengalaman belajar siswa dalam kaitannya dengan representasi Tionghoa diinterpretasi lebih lanjut. Analisis ini didasarkan atas indikator-indikator yang telah dirumuskan berdasarkan teori untuk memahami kebinekaan yang dikonstruksi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian disertasi ini bermanfaat secara teoretis untuk bidang ilmu Pendidikan Sejarah. Analisis makna representasi Tionghoa dalam buku teks dan pengalaman belajar siswa dalam mengonstruksi wacana kebinekaan dapat menguatkan teori tentang pentingnya pendidikan sejarah yang inklusif. Selain itu, pembelajaran sejarah yang merepresentasikan Tionghoa secara adil dan berimbang sebagai bagian dari sejarah nasional sangat relevan dengan kenyataan hidup berbangsa di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini secara teoretis mengukuhkan tujuan pendidikan sejarah dalam menumbuhkembangkan pemahaman kolektif sebagai bangsa dan rasa nasionalisme melalui kesadaran terhadap nilai-nilai kebinekaan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian disertasi ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi

1. Para pengambil kebijakan; hasil penelitian disertasi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kurikulum dan perumusan pembelajaran sejarah yang inklusif dengan mengakomodasi peran Tionghoa. Hal ini sangat tepat dengan momentum Kurikulum Merdeka yang mengusung Profil Pelajar Pancasila, terutama terkait dengan karakter berkebinekaan global.
2. Para penulis buku teks sejarah; hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam penulisan ulang buku teks sejarah yang merepresentasikan peran Tionghoa

secara adil dan berimbang. Dengan demikian dihasilkan buku teks sejarah yang inklusif sehingga mendukung konstruksi kebinekaan untuk integrasi bangsa.

3. Para pengelola Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), khususnya pada Program Studi Pendidikan Sejarah; hasil penelitian ini merupakan bahan pertimbangan bagi formasi guru sejarah dengan kesadaran kebinekaan. Mahasiswa calon guru sejarah perlu dipersiapkan sebagai pewarta kebinekaan melalui pemahaman pendidikan sejarah yang inklusif.
4. Para guru sejarah; hasil penelitian ini bermanfaat untuk pemberdayaan diri guru maupun siswa yang diajarnya. Guru dapat terinspirasi untuk bersikap kritis dalam menggunakan buku teks sekaligus mengembangkan pembelajaran sejarah yang bermakna, secara khusus dalam merepresentasikan peran Tionghoa untuk menumbuhkembangkan rasa kebangsaan siswa melalui kesadaran akan kebinekaan.
5. Para peneliti selanjutnya; hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Topik kajian, metode, hingga sisi-sisi lain yang belum tersentuh dalam penelitian disertasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi sekaligus bahan diskusi yang semakin kaya dan bernas.

### **1.5 Struktur Organisasi Disertasi**

Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian yang mendasari alasan perlunya menganalisis representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia ditinjau dari buku teks dan pengalaman belajar siswa. Makna digali secara kritis dari wacana yang dibangun dalam buku teks dan pengalaman belajar siswa hingga akhirnya menemukan konstruksi kebinekaan di dalamnya. Selanjutnya dirumuskan masalah-masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan secara spesifik yang diidentifikasi dari fokus penelitian. Berikutnya dijelaskan tujuan dari penelitian untuk menggali masalah-masalah yang telah dirumuskan. Bagian selanjutnya adalah manfaat penelitian yang meliputi manfaat secara teoretis dan praktis. Terakhir disampaikan pula struktur organisasi disertasi yang memberi gambaran kandungan dari setiap bab, urutan penulisan, dan keterkaitan antarbab sehingga membentuk sebuah kerangka utuh disertasi.

Bab II. Kajian Pustaka memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini juga ditunjukkan perkembangan mutakhir yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran sejarah sebagai *state of the art* dari penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini berisi sintesis teori dan konsep-konsep secara analitis mengenai representasi Tionghoa dalam historiografi Indonesia, analisis wacana kritis buku teks sejarah, belajar dan pembelajaran sejarah dalam perspektif kritis, dan kebinekaan dalam bingkai multikulturalisme yang seluruhnya dirangkai dalam perspektif teori kritis (*critical theory*). Selain itu disajikan berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran dari jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang bereputasi. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan posisi dan fokus penelitian serta kebaruannya. Pada bagian akhir, ditampilkan kerangka pikir penelitian yang memperjelas gambaran tentang kajian penelitian dan kaitannya dengan teori-teori yang digunakan.

Bab III. Metode Penelitian meliputi desain penelitian, sumber data dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, derajat kredibilitas data, dan alur penelitian yang digunakan. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan mengintegrasikan CDA dan studi fenomenologi. Penelitian menggunakan metode CDA untuk menganalisis representasi Tionghoa dalam buku teks. Selanjutnya dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode fenomenologi untuk menganalisis pengalaman belajar siswa dalam implementasi pembelajaran Sejarah Indonesia yang merepresentasikan Tionghoa.

Bab IV. Temuan dan Pembahasan memaparkan dua hal utama yakni temuan dan pembahasan. Temuan penelitian berisi pemaparan hasil pengolahan dan analisis data. Pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan pola nontematik untuk memaparkan temuan dan pembahasan. Setiap temuan dipaparkan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara terpisah. Temuan meliputi hasil analisis buku teks dan kajian pengalaman belajar siswa. Pembahasan menganalisis temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia yang ditinjau dari buku teks dan pengalaman belajar siswa, pemaknaannya dalam buku teks dan pengalaman belajar siswa, dan

konstruksi kebinekaan yang ditunjukkan dari representasi Tionghoa dalam buku teks dan pengalaman belajar siswa untuk dicari relevansinya.

Bab V. Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan serta mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. Simpulan disajikan dengan cara uraian padat yang menjawab pertanyaan penelitian pada Bab I. Implikasi teoretik ditujukan bagi pendidikan sejarah di Indonesia serta implikasi praktis bagi penulis dan pemangku kebijakan terkait dengan buku teks dan guru terkait dengan pembelajaran sejarah. Rekomendasi berupa saran yang terkait erat dengan temuan utama penelitian.